

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Anggalana. (2015). Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam pemenuhan hak azasi manusia. *Keadilan Progresif*, 6, 128–130.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- D.W.P Ruiter. (2010). *Institutional Legal Facts: Legal Power and Their Effects*. London: Law and Philosophy Library.
- Djamali, A. (2010). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Gabriel, G. (2017). Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Surat Kabar Harian Surya Malang. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6.
- Iskandar, S. M. (2017). *Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan*. Jakarta: Tatanusa.
- Marzuki, M. P. (2017). *Pengantar Ilmu HUKUM*. Jakarta: Pranata Media.
- Nurlatifah, M. (2018). Posisi Undang-undang Pers Indonesia dalam ekosistem media digital. *Profetik Jurnal Komunikasi*, 11, 71–85.
- Prasetyo, T. (2013). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Priyatno, D. (2017). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam kebijakan Legislasi*. Depok: Kencana.
- Purnomo, B. (1993). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Rahman, S. (2017). Kejahatan Pencemaran Nama Baik Atas Pemberitaan Pers Di

Kota Malang. *Restorica*, 3.

Rahmat Hidayat, A. (2015). Fenomena Penyimpangan Profesi Jurnalis. *Jurnal Komunikasi*, 10.

Rato, D. (2010). *Filsafat Hukum Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Rismawati, D. S. (2015). Menebarkan Keadilan Sosial Dengan Hukum Progresif Di Era Komodifikasi Hukum. *Jurnal Hukum Islam*, 13.

Shahrani, R. (2013). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya.

Laila, H. (2012). *Jurnal-Penelitian-Pers-dan-Komunikasi-Pembangunan.pdf*.

Lamintang. (2013). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: PT.Citra karya Abadi.

Poti, J. (2011). Demokratisasi media massa dalam prinsip kebebasan. *Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 17–29.

Prasetyo, T. (2013). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

B. PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasas Negara Kesatuan Reublik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan Pokok Pers yang sebagai mana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalah Gunaan dan/atau Penodaan Agama

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

3. Web.

Hukumonline.com. (2003). Diakses pada tanggal 3 April 2019. Retrieved April 3, 2019, from <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8115/irakyat-merdekai-kembali-dimejahijaukan>

1. Jurnal

Erdiansyah, S.H., M.H (2015) jurnal ilmu hukum dengan judul “Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau”

Mufti Nurlatifah (2018) ISSN 1979-2522 dengan judul penelitian “Posisi Undang-undang Pers Indonesia Dalam Ekosistem Media Digital

Muh. Arman, M. Syukri Akub, Wiwie Heryani ISSN: 2549-9785 dengan judul penelitian “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Berita Hoaks Melalui Media Online”

Anggalan (2015) ISSN :2087-2089 dengan judul penelitian “Implementasi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia”

Agus Wibowo(2015)ISSN: 2355-0481 dengan judul “Rekonstruksi Fungsi Pers Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan”

Gabriel Gawi, Akhirul Aminnullah, Ellen Meianzi Yasak (2017) ISSN :2442-6962 dengan judul penelitian “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Surat Kabar Surya Malang